



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan.

Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup



Roli Buchari, S.T., M.T
NIP. 197504172005011013

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama, misi ketiga dan Misi keenam. Misi pertama yaitu ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan,*** misi ketiga yaitu ***“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”*** dan misi keenam yaitu ***“Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis”***..

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan

Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- VISI** : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**
- MISI 1** : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- MISI 3** : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**
- TUJUAN 3.1 : Terwujudnya Kegiatan Pembangunan Yang berwawasan Lingkungan
- SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- MISI 6** : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**
- TUJUAN 6.1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tenram dan Dinamis
- SASARAN 6.1.2 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
 Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi					
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Perangkat Daerah	A (89)	A (88,91)	99,898%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	97	97,00%
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
3	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80	83,05	103,812%
MISI 6 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis					
4	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,2033%	93,0121%	99,794%
Rata Rata					100,126 %

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kinerja untuk 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja yang terdapat pada Tabel 1 sebesar 100,126 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik:**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	4
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	15
1.5 LANDASAN HUKUM.....	17
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERKIMTANLH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016- 2021	22
2.2 RENCANA KINERJA.....	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	35
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	36
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERKIMTANLH KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	38
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	75
BAB IV PENUTUP	77
4.1 KESIMPULAN.....	77
4.2 SARAN.....	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	Iv
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.3	Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	8
Tabel 1.4	Inventarisasi Peralatan Laboratorium Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	26
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	29
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	34
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	36
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	36
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025.....	38
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan 3 Tahun Terakhir.....	39
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya	



	Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	40
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025.....	41
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Tahun 2025.....	47
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi dengan 3 Tahun Terakhir.....	48
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	49
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi.....	49
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Nilai Inovasi.....	50
Tabel 3.13	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan Tahun 2025.....	50
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan.....	53
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan.....	53
Tabel 3.16	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024 Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan.....	54
Tabel 3.17	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	55
Tabel 3.18	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan.....	56
Tabel 3.19	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan.....	57
Tabel 3.20	Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2025.....	63
Tabel 3.21	Penanganan Pengaduan Lingkungan dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/Kota Tahun 2025.....	63
Tabel 3.22	Realisasi Kegiatan yang menunjang Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	65



Tabel 3.23	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaam Rumah Layak Huni Unggulan Tahun 2025.....	67
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir indikator kinerja Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni.....	68
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	68
Tabel 3.26	Perbandingan Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025.....	70
Tabel 3.27	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.....	70
Tabel 3.28	Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	71
Tabel 3.29	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni.....	71
Tabel 3.30	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis.....	72



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	7
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 s.d Tahun 2025.....	69



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas PERKIMTANLH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	14
Gambar 2.1	Berita Acara Rasionalisasi Rencana Strategis	31
Gambar 2.2	LHE Akip Menpan RB Tahun 2025	33
Gambar 3.1	Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.....	43
Gambar 3.2	Gambar Hasil Penilaian Kinerja oleh Inspektorrat	44
Gambar 3.3	Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	45
Gambar 3.4	Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2024.....	47
Gambar 3.5	Pengujian Sampel Indeks Kualitas Air.....	57
Gambar 3.6	Rapat Pengaduan dan Tinjauan Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan	64
Gambar 3.7	Foto Penerimaan Penghargaan Piala Adiwiyata.....	66
Gambar 3.8	Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Sebelum dilakukan Rehabilitasi).....	74
Gambar 3.9	Kondisi Rumah Layak Huni (Setelah dilakukan Rehabilitasi).....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang - undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian LKjIP merupakan evaluasi dan laporan dari hasil pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah diatur dengan Peraturan Bupati pesisir selatan No. 140 tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup dalam urusan Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah di capai selama tahun 2025.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu pimpinan daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah dengan Fungsi

1. evaluasi rumah umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pertanahan;
3. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya urusan perumahan dan kawasan permukiman;
5. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pertanahan;
6. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangan - undangan

Dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a) Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian sebagai berikut:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- c) Bidang Pertanahan,

- d) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
- e) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup,
- f) UPTD Laboratorium ; dan
- g) Jabatan Fungsional.

Saat ini pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 42 orang PNS, PPPK 19 orang dan 84 Tenaga Honorer, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas. 4 Kepala Bidang dan 9 Kasubag/ Kasi. Berdasarkan Tingkatan pendidikan nya pegawai Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 1.1

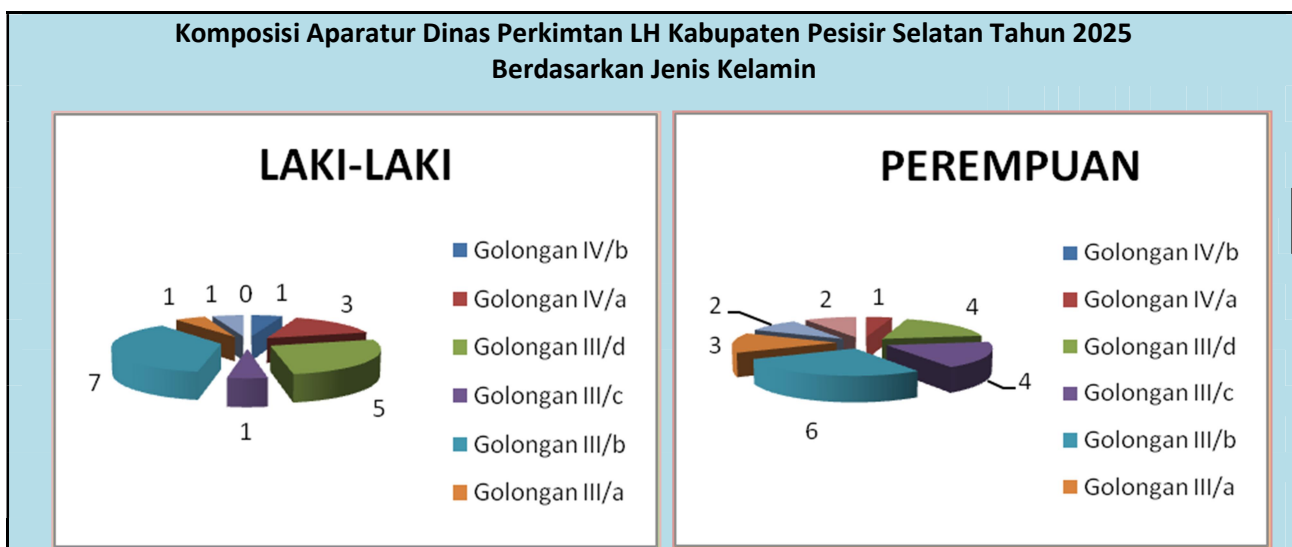
Komposisi Aparatur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS/Honorer
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	-	-	-
2	Golongan IV/b	1	-	1
3	Golongan IV/a	4	1	5
	Sub Jumlah	5	1	6
4	Golongan III/d	3	4	7
5	Golongan III/c	1	4	5
6	Golongan III/b	5	7	12
7	Golongan III/a	2	4	6
	Sub Jumlah	11	19	30
8	Golongan II/d	2	2	4
9	Golongan II/c	-	2	2
10	Golongan II/b	-	-	-
11	Golongan II/a	-	-	-
	Sub Jumlah	2	4	6
12	PPPK	14	5	19
13	Honorer	55	29	84
	TOTAL	87	58	145

Grafik 1.1

Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin



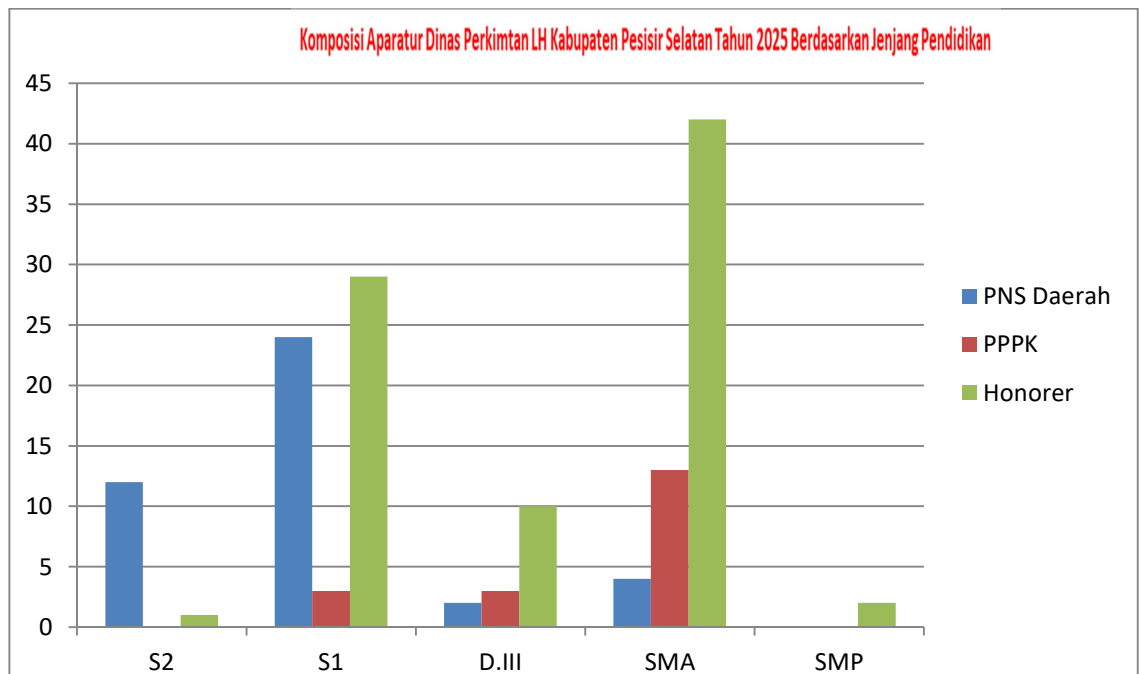
Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai					Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PPPK	Honorer		
S2	12	-	-		1	13	8,96
S1	24	-	-	3	29	56	38,62
D. III	2	-	-	3	10	15	10,34
SMA	4	-	-	13	42	59	40,68
SMP	-	-	-	-	2	2	1,37
SD	-	-	-	-			-
TOTAL	42	-	-	19	84	145	100

Grafik 1.2

**Komposisi Aparatur Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain diklat Amdal, diklat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), diklat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup menggunakan Sarana dan Prasarana didukung oleh Sarana dan Prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya, Peningkatan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pengelolaan Pertanahan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan .

Tabel 1.3
Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Sarana Prasarana	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	5 unit
2	Kendaraan Roda Dua	17 unit
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	4 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit
5	Bangunan UPT Laboratorium LH	1 unit

Pada tahun 2008 diresmikan laboratorium untuk melaksanakan standar pelayanan minimal lingkungan hidup, labor ini memiliki peralatan untuk pemeriksaan kualitas air dan Udara seperti: suhu, Ph (derajat keasaman) dan DO (oksigen terlarut). Keterbatasan alat mengakibatkan sedikitnya parameter kualitas air dan udara yang dapat diukur. Pengoperasional labor ini telah dirumuskan pada tahun 2009.

Kondisi saat ini peralatan yang dimiliki laboratorium Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup masih banyak keterbatasan sesuai dengan standar Laboratorium Lingkungan Hidup (seperti dalam tabel berikut) :

Tabel 1.4
Inventarisasi Peralatan Laboratorium Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
1	Global Positioning Aystem (Garmin)	1	Baik	Digunakan	2006	DAK
2	Spektroquannova Merck	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
3	DO Meter (YSI)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
4	Conductivity Meter (Mirron)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
5	Current Meter	1	Baik	Digunakan	2006	DAK
6	PH Meter (Orrion)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
7	Portable Turbidimeter	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
8	Timbangan	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
9	Centrifuge	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
10	Refrigerator/Freezer	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
11	Mikroskop Binokuler	1	Baik	Tidak	2007	DAK
12	Perangkat Titrasi	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
13	Desikator	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
14	Salino Meter	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
15	Water sample	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
16	Oven	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
17	Hotplate	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
18	Lemari Asam	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
19	Mobil workshop	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
20	Penangas Air	1	Baik	Tidak	2007	DAK
21	Autocly	1	Baik	Digunakan	2008	DAK
22	Stopwatch (CasioHS3-1)	1	Baik	Digunakan	2009	DAK
23	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	1	Rusak	Tidak	2009	DAK
24	DO Meter (Eutech)	1	Rusak	Tidak	2009	DAK
25	Anemometer	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
26	Extraction Heater	1	Rusak	Tidak	2011	DAK
27	Soun Level Meter Tester	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
28	GPS (Global Positioning system)	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
29	Spektofotometer UV-Vis PG Instrument	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
30	COD Reaktor (HANNA/ HI 839800-02)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
31	Pompa Vacum	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
32	Desikator Auto Dry	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
33	Filter dan Holder	1	Baik	Digunakan	2013	DAK

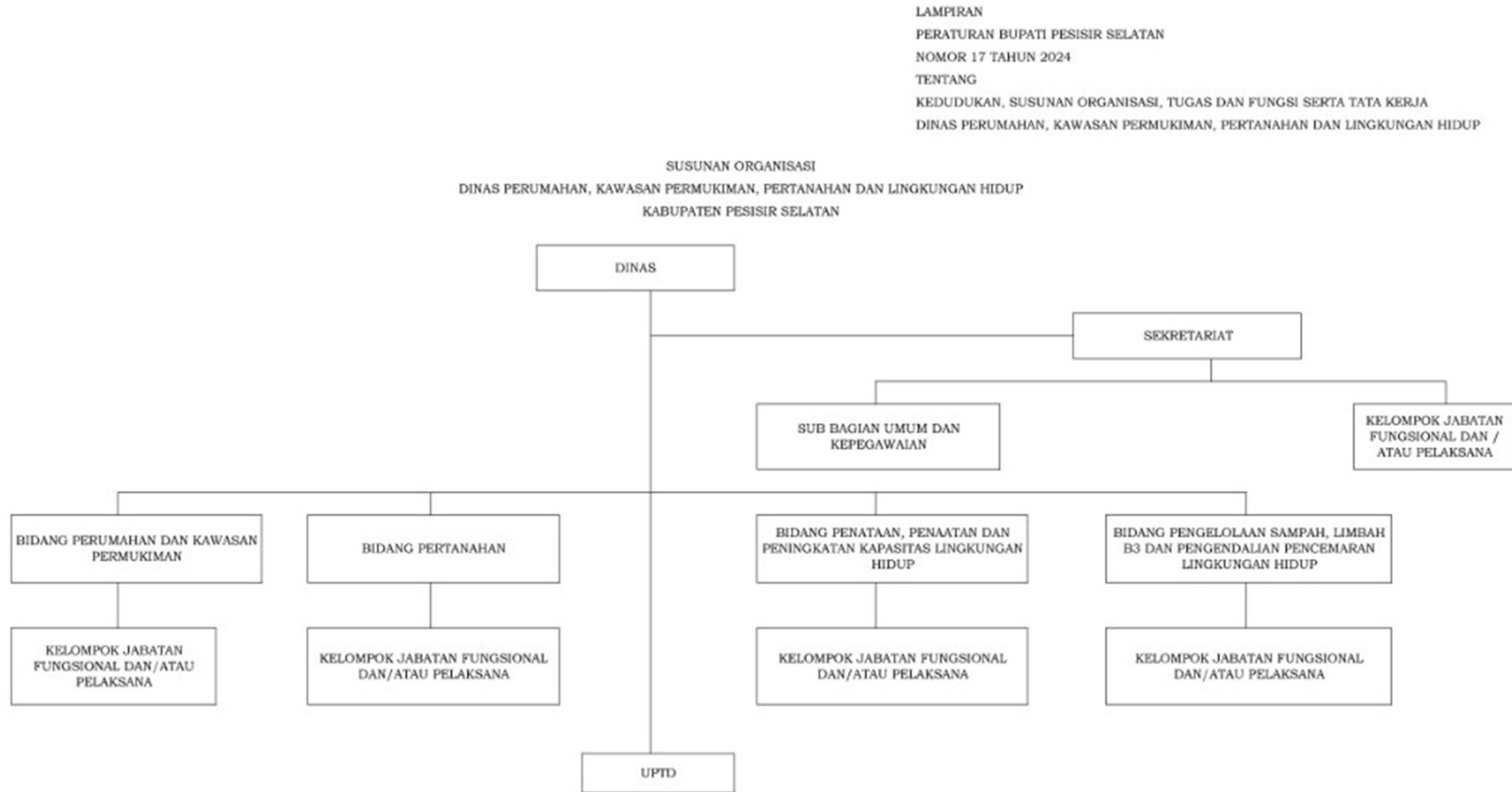
No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
34	PH Elektroda	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
35	Turbidity Meter	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
36	Water Sampler	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
37	DO Meter (HI 9146/ HANNA)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
38	PH Meter (D54 E HO RIDA)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
39	Klem Buret Double	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
40	Alat Destilasi	1	Baik	Tidak	2015	DAK
41	Alat Pengukur Emisi Kendaraan	1	Baik	Tidak	2015	DAK
42	Neraca analitik (Fujisu/FS- AR 210)	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
43	Oven(Memmert/Uf-76)	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
44	pH meter	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
45	Conductivity	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
46	Magnetic Stirer	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
47	Dispensmate Plus 0.5 -5 ml	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
48	Dispensmate Plis 1- 10 ml	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
49	Pippet Filler Levo me	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
50	Pippet Filler Levo me	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
51	Cool Box	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
52	Trolley Instrumen 2 Rak	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
53	Tabung Aerasi 10 Liter	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
54	BOD incubator	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
55	Oven (Un 55)	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
56	Analytical Balance	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
57	Rak tabung reaksi	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
58	Scrubber	1	Baik	Digunakan	2020	APBD
59	Rak tabung reaksi	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
60	Fume Scrubber	1	Baik	Digunakan	2020	APBD
61	Safety Shower	1	Baik	Digunakan	2021	APBD
62	Gelas Piala 50 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
63	Labu Ukur 50 ml	8	Baik	Digunakan	2022	APBD
64	Labu Ukur 100 ml	15	Baik	Digunakan	2022	APBD
65	Labu Ukur 250 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
66	Labu Ukur 500 ml	4	Baik	Digunakan	2022	APBD
67	Pipet volumetrik 10 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
68	Pipet Volumetrik 100 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
69	Pipet Volumetrik 1 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
70	Pipet Volumetrik 25 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
71	Pipet Volumetrik 2 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
72	Pipet Volumetrik 4 ml	4	Baik	Digunakan	2022	APBD
73	Wide Mouth Bottle PE 500 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
74	Decikator Auto Dry Horizontal	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
75	Pipette Filler Levo Plus	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
76	Dispenmate Plus dispenser 2.5 25 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
77	Rack for Sep. Funnel For 2 L	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
78	Spatula Double Spoon 120 mm	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
79	Micro Spatula Spoon dia 185 mm	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
80	Test Tube Rack dia 21 mm, 21x50	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
81	Pipette Support Rack PP, W=213 mm	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
82	Atomic Absorption Spectrophotometer Unit (AAS)	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
83	Rotary Evaporator	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
84	COD Reaktor	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
85	pH Meter Benctop	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
86	Oven	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
87	Buret Teflon Bening 10 ml	3	Baik	Digunakan	2022	APBD
88	Buret Teflon Coklat 10 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
89	Erlenmeyer Flask 100 ml	15	Baik	Digunakan	2022	APBD
90	Burette Teflon Stopcock Clear Amber Grduation Class A 10 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
91	Erlenmeyer Flask 250 ml	40	Baik	Digunakan	2022	APBD
92	Test Tube w/o Screwv cap, Clear, OD 20 X 125 mm	50	Baik	Digunakan	2022	APBD
93	Screw Cap Teflon Liner For Test Tube no.18	50.	Baik	Digunakan	2022	APBD
94	Incubator 53 Liter	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
95	Precision Balance 0.01 gr	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
96	Classic Magnetic Hotplate Stirer MS-H-S	1	Baik	Digunakan	2023	APBD
97	Corong Pisah 250 ml	10	Baik	Digunakan	2023	APBD
98	Corong Short Stem 5 cm	5	Baik	Digunakan	2023	APBD
99	Corong Short Stem 7 cm	10	Baik	Digunakan	2023	APBD
100	Rak For Separature Funnel	1	Baik	Digunakan	2023	APBD
101	Rak Test Tube Plastik	3	Baik	Digunakan	2023	APBD
102	Tabung Durham 35x6 mm	200	Baik	Digunakan	2023	APBD

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
103	Tabung Durham 35x6 mm	100	Baik	Digunakan	2023	APBD
104	Botol Reagen Gelap 1000 ml	4	Baik	Digunakan	2023	APBD
105	Botol Reagen Gelap 1000 ml	20	Baik	Digunakan	2023	APBD
106	Erlenmeyer 100 ml	20	Baik	Digunakan	2023	APBD
107	Labu 50 ml	30	Baik	Digunakan	2023	APBD
108	Labu 100 ml	4	Baik	Digunakan	2023	APBD
109	Pipet Volumetrik 2 ml	1	Baik	Digunakan	2023	APBD
110	Pipet Volumetrik 25 ml	10	Baik	Digunakan	2023	APBD
111	Labu Ukur 25 ml	4	Baik	Digunakan	2023	APBD
112	Pipet Ukur 10 ml	6	Baik	Digunakan	2023	APBD
113	Pipet Volumetrik 2 ml	3	Baik	Digunakan	2023	APBD
114	Pipet Volumetrik 10 ml	6	Baik	Digunakan	2023	APBD
115	Botol Reagen Gelap 1 L	1	Baik	Digunakan	2023	APBD
116	Buret Teflon Gelap	1	Baik	Digunakan	2023	APBD
117	Wide Mouth Bottle PE 500	10	Baik	Digunakan	2023	APBD
118	Micropipette Plus Single Channel 100-1000 ul	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
119	Micropipette 10-100 ul	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
120	Erlenmeyer flask 100 ml	10	Baik	Digunakan	2024	APBD
121	Pipet Measuring serological 10 ml	3	Baik	Digunakan	2024	APBD
122	Beaker Glass LF 1000 ml	4	Baik	Digunakan	2024	APBD
123	Volumetric Flask with plastic stopper 50 ml	40	Baik	Digunakan	2024	APBD
124	Volumetric Flask with plastic stopper 100 ml	30	Baik	Digunakan	2024	APBD
125	Burette, Teflon stopcock 10 ml	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
126	Volumetric Flask with plastic stopper 250 ml	5	Baik	Digunakan	2024	APBD
127	Cork Rings, 250-500 ml	10	Baik	Digunakan	2024	APBD
128	Aluminium foil	3	Baik	Digunakan	2024	APBD
129	Beaker 100 ml	10	Baik	Digunakan	2024	APBD
130	Beaker 500 ml	3	Baik	Digunakan	2024	APBD
131	Cawan porselain	32	Baik	Digunakan	2024	APBD
132	Glass stopper	10	Baik	Digunakan	2024	APBD
133	Evaporating flask	10	Baik	Digunakan	2024	APBD
134	Laboratory Bottle	5	Baik	Digunakan	2024	APBD
135	Glass microfiber	4	Baik	Digunakan	2024	APBD
136	UV-VIS Spectrophotometer double beam,UV-1900I	1	Baik	Digunakan	2024	DAK
137	Autoclave	1	Baik	Digunakan	2024	DAK

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
138	Vertical Laminar Air Flow	1	Baik	Digunakan	2024	DAK
139	Water Purification System	1	Baik	Digunakan	2024	DAK
140	Tabung durham	5	Baik	Digunakan	2024	APBD
141	Rak testube plastik	5	Baik	Digunakan	2024	APBD
142	Rak for separature funnel 200-300 ml	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
143	Corong pisah	5	Baik	Digunakan	2024	APBD
144	Teepol 1 liter	6	Baik	Digunakan	2024	APBD
145	KCL Calibration Solution 111.8 mS/cm	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
146	KCL Solution Calibration 12.88 mS/cm	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
147	Solution Calibration 1413US/CM	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
148	CRM, Solids, Concentrate, ERA-5152	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
149	Solid Concentrate, CRM, ERA-4032	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
150	BGLB/Brilia Broth, 500 gr	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
151	Spiritus, 1 l	3	Baik	Digunakan	2024	APBD
152	Mangan sulfat mono hidrat	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
153	Potassium peroxodisulfate	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
154	Sodium hydroxide	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
155	Trisodium citrat	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
156	Mangan II Sulfat	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
157	Polysed BOD	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
158	n-Hexana	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
159	Acetone, 4 l	1	Baik	Digunakan	2024	APBD
160	Sulphuric Acid 95-97% @ 2,5 l	2	Baik	Digunakan	2024	APBD
161	Pipet measuring 1 ml	3	Baik	Digunakan	2025	APBD
162	Pipet measuring 2 ml	3	Baik	Digunakan	2025	APBD
163	Pipet measuring 10 ml	4	Baik	Digunakan	2025	APBD
164	Spatula with double spoon, SS 210 mm	2	Baik	Digunakan	2025	APBD
165	Pipet Volumetric 30 ml	1	Baik	Digunakan	2025	APBD
166	Tips Blue Spesifikasi : Axygen @1000 pcs	2	Baik	Digunakan	2025	APBD
167	Cool Box 35 S	2	Baik	Digunakan	2025	APBD
168	Cool Box 18 S	1	Baik	Digunakan	2025	APBD
169	Dispenser Labmax	1	Baik	Digunakan	2025	APBD

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



BUPATI PESIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

A. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Pimpinan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dengan Fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.
- c) pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup;
- e) pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- f) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;
- h) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup Dinas;

- i) pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup melakukan kegiatan utama berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengembangan Perumahan Rakyat dan Permukiman

B. Permasalahan Utama

Isu-isu strategis adalah kondisi atau permasalahan utama yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengembangan Perumahan Rakyat dan Permukiman. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup

- a. Belum maksimalnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

- b. Belum adanya pejabat yang berkompetensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD) dan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan.
- c. Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah, sehingga apabila tidak tertangani dengan baik dan optimal akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah sehingga sampah menjadi lebih banyak.

2) **Isu - isu Strategis Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

1. Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat

Belum optimalnya akses permukiman layak huni disebabkan :

- 1. Rendahnya ketersediaan rumah layak huni
- 2. Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
- 3. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 4. Masih rendahnya realisasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh
- 5. Masih ada beberapa Kawasan Permukiman yang berada dalam Kawasan Hutan

2. Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan secara transparan dan akuntabel

Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran

- 1. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
- 2. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
- 3. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presien Nomor 101 Tagun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Orgabisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah - langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam penyusunan Renstra ini harus mengacu kepada visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021–2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis ini juga dilakukan rasionalisasi pada Tahun 2022 seiring dengan Rasionalisasi RPJMD 2021 - 2026 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Pesisir Selatan. Rasionalisasi ini juga dilakukan pada Casecading dan Pohon Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

2.1.1 Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

**MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam

- memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2 Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja oleh segenap stakeholder pembangunan. Berdasarkan Visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

- I. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- II. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- III. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;

- IV. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
- V. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- VI. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat, Misi ke 6 yaitu Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis untuk urusan bidang perumahan dan permukiman, Misi ke 1 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Demokratis dan Transparan untuk urusan bidang pertanahan dan Misi ke 3 yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah untuk urusan Lingkungan Hidup.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Akhir Renstra	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Penjelasan Formula Perhitungan	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.69	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Hasil Evaluasi Inspektorat	B (70)	BB (80)	A (87,5)	A (88)	A (89)	A(90)
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Hasil Evaluasi Badan Litbang Kemendagri	100	100	100	100	100	100
				Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0.376 \cdot \text{IKA} + 0.405 \cdot \text{IKU}) + (0.219 \cdot \text{IKL})$	86.74	72,45	72,76	73,07	73,38	73,69
				Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Luas Permukiman Layak huni/Luas Wilayah permukiman	96.82 %	91.09 %	91.7109 %	93.2033 %	94.0788 %	94.4274 %

2.2 RENCANA KERJA

Tahun 2025 adalah Tahun Keempat Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan dijabarkan di Rencana Kerja Perangkat sebagai Dokumen Teknis Operasional

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89)
2		Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tanpa Satuan	80
3		Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,2033 %
4		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Persen	100 %

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisis Situasi:** Pahami kondisi saat ini dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup , termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
2. **Penetapan Tujuan:** Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang akan membimbing penetapan target.
3. **Tujuan Strategis:** Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. **Indikator Kinerja:** Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. **Target Spesifik:** Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. **Rencana Aksi:** Buat rencana aksi terperinci dengan langkah - langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7. **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Program Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee
				Penetapan Tanah Ulayat
2	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH \text{ diperoleh} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Nilai IKA (indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) diambil dari Pengujian	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Keaneragaman Hayati (KEHATI)

				Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi Inovasi Government Award (IGA)	Pengelolaan Persampahan

Sumber : Perencanaan dan pelaporan Tahun 2025

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 yang merupakan bentuk Komitmen antara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Program-Program Kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berisi tentang Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada tahun anggaran bersangkutan. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	A (89)
2	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80
3	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,2033 %
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	100

Sumber : Perencanaan dan pelaporan Tahun 2025

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, target dihitung berdasarkan hasil

penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terget dihitung berdasarkan formula yang telah ditetapkan dari Hasil Pengujian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan Mengambil Sampel di beberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Pengujian Indeks Kualitas Air diambil sampel dari beberapa titik sungai pada musim hujan dan musim kemarau. Pengujian Indeks Kualitas Udara mengambil sampel di lokasi padat penduduk dan Ramai lalu lintas (untuk menentukan polusi udara), lokasi pedesaan dan perkotaan. Kemudian untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan didapatkan dengan cara menentukan Titik Ruang Terbuka Hijau kemudian ditentukan Luasan RTH setelah itu di Deliniasi melalui Aplikasi Goggle Earth, hasil deliniasi tersebut ditabelkan serta dilakukan penginputan data RTH tersebut ke website ppkl.menlhk.go.id beserta lampiran pendukung peta deliniasi nya. Pada website akan otomatis mengolah data dan dihasilkan Nilai Indeks Kualitas Lahan. Semua hasil pengujian dan data yang diambil baik IKA, IKU, IKL di entri di Aplikasi ppkl.menlhk.go.id sehingga menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- c. Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, terget dihitung berdasarkan jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni setiap tahun. Cara menghitungnya Jumlah Rumah dikurang jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak Huni. Formulanya adalah Jumlah Rumah Layak Huni dibagi dengan jumlah Rumah di Kali 100 %
- d. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Pahlawan Rawang Painan**

**BERITA ACARA RASIONALISASI RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN
Nomor: 050/03 / PERKIMTANLH/I/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Renstra pada BAB IV dan VI tentang target kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
	Tahun Ke-1 2022	Tahun Ke-2 2023	Tahun Ke-3 2024	Tahun Ke-4 2025	Tahun ke-5 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,45	72,76	73,07	73,38	73,69
Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788

Dan juga tentang Cascading Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

30 Januari 2023
DINAS
MUNTRID, L. SH
1961111199309 1 001

Diketahui

Kepala Bapedalitbang
HADI SUSILO, S,STP, M.Si
NIP.19770522 199703 1 001

Inspektur Daerah
RUSDYANTO, SH
NIP.1961111199203 1 008

Sekretaris Daerah
MAWARDI ROSKA, S.I.P
NIP.19670907 198902 1 001

Gambar 2. : Rasionalisasi Renstra Perkimtan LH Tahun 2021-2026

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 100/1.2/SK-PERKIMTANLH/1/2025
 TANGGAL : 17 JANUARI 2025
 TENTANG : REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Penjelasan Formula Perhitungan	Target						Sumber Data
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	B (70)	BB (80)	A (87,5)	A (88)	A (89)	A (90)	Dinas Perkimtan LH
2	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0.376 \cdot \text{IKA} + 0.405 \cdot \text{IKU}) + (0.219 \cdot \text{IKL})$	86,74	72,45	72,76	73,07	80	80,48	Dinas Perkimtan LH
3	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Luas Permukiman Layak huni/Luas Wilayah permukiman	96.822 9%	91,094 4%	91,7109 %	93,2033 %	93,2033 %	94,4274 %	Dinas Perkimtan LH
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Hasil Evaluasi Badan Litbang Kemendagri	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkimtan LH

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PESIR SELATAN

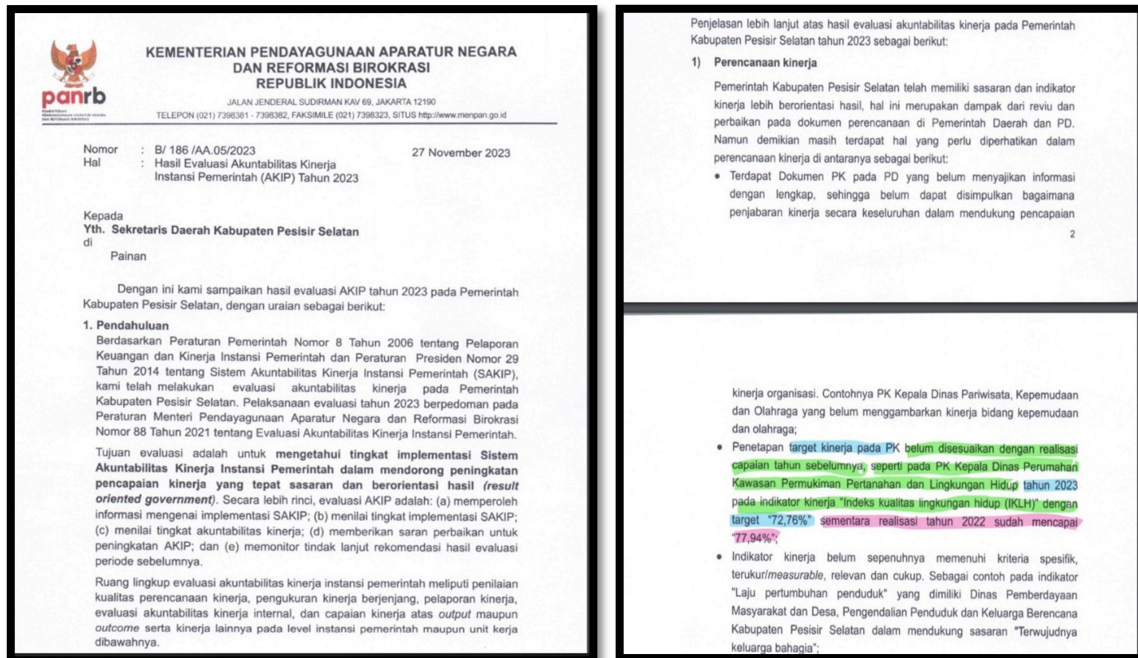
Hardi Darma Putra, S.H., M.Si
 NIP. 196709011986021001

Gambar 2. : Revisi IKU 2021-2026 Perkimtan LH Tahun 2025

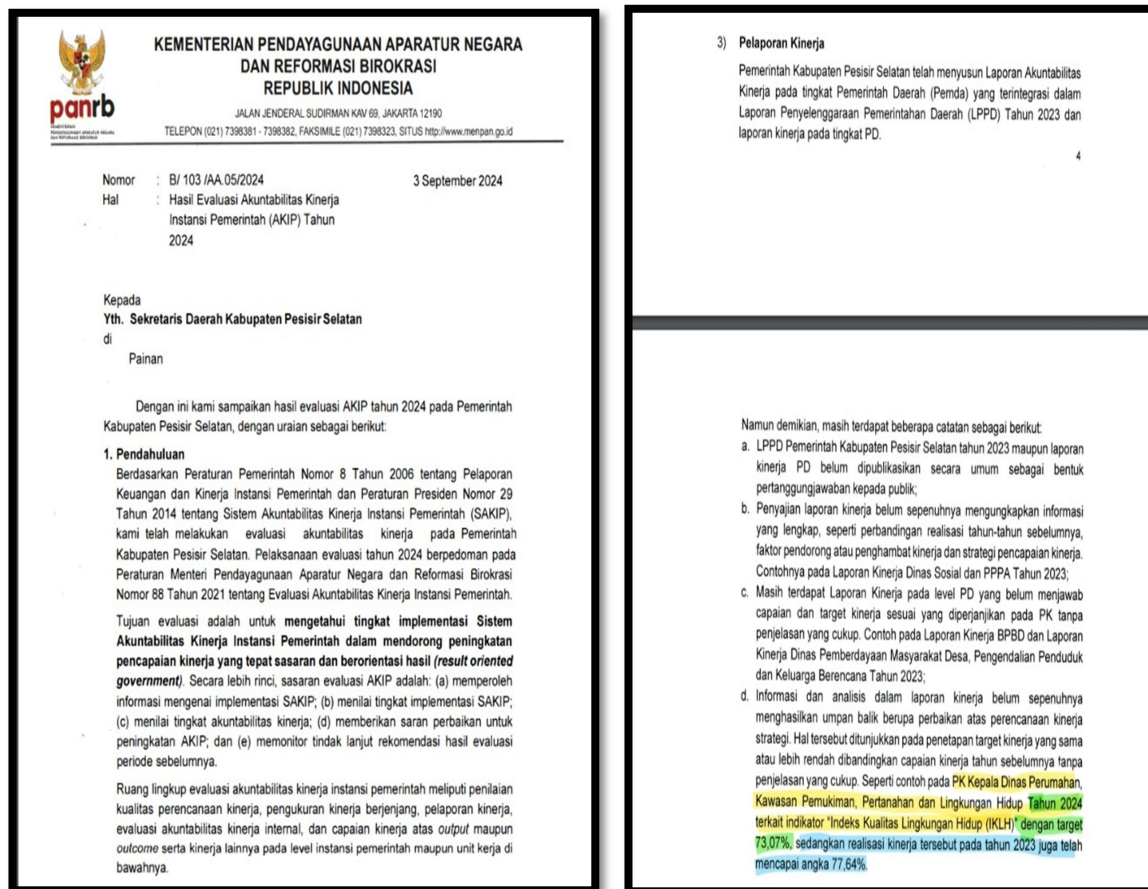
Pada Tahun 2024 karena Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak berubah, pada LHE Tahun 2024 Nomor 8/ 103 /AA.05/2024 tanggal 03 September 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mendapat rekomendasi lagi pada Komponen Pelaporan Kinerja PK Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 terkait Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 73,07 sedangkan realisasi kinerja tersebut pada Tahun 2023 juga telah mencapai angka 77.64.

Berdasarkan hasil tersebut diatas pada Tahun 2025, dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama untuk merubah target Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena sudah dua tahun berturut turut target Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan rekomendasi pada Laporan Hasil Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan

Berikut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2024



Gambar 2.2 LHE Akip Menpan RB Tahun 2023



Gambar 2.2 LHE Akip Menpan RB Tahun 2024

Tabel 2.5.

Program dan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	A (88)	5.526.666.619
2	Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			16.251.895
3	Penetapan tanah Ulayat			18.320.125
4	Kawasan Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,2033 %	134.961.170
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			700.000.000
6	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			35.639.540
7	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80	430.095.514
8	Pengelolaan Keaneragaman Hayati (KEHATI)			1.953.380.999
9	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			13.107.530
10	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			86.618.443
11	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			46.996.170
12	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			22.771.480
13	Pengelolaan Persampahan	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	6.732.188.147

Sumber : Perencanaan dan pelaporan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja bmengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih , Efktif , Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Perangkat Daerah	-	A (89)	A (88,91)	99,898%
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	-	100	97	97 %
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	80	83,05	103,812 %
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tenang dan dinamis	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	93,2033 %	93,0121 %	99,794 %
Rata Rata							100,126 %

Sumber : Perencanaan dan pelaporan Tahun 2025

Sebagaimana tabel 3. 2 diatas bahwa pada tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Lingkungan Hidup, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan, dengan 13 Program, 18 Kegiatan, 40 sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan target A (89). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah A (88,91) atau sebesar 99,898 % dengan predikat sangat baik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.
2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah 97,00 atau sebesar 97,00% dengan predikat sangat baik.
3. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)) dengan target 80. Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 83,05 atau sebesar 103,812 % dengan predikat sangat baik. Realisasi Nilai IKLH dihitung menggunakan aplikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menginput data hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
4. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dengan target 93.2033 %. Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah 93,0121 atau 99,794 % dengan predikat sangat baik. Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni belum bisa mencapai target karena tahun ini Kabupaten Pesisir selatan hanya mendapat bantuan RTLH sebanyak 41 Unit dari target awal 100 Unit.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar

100,126 % dengan predikat sangat baik.

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai Akip Perangkat Daerah yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target A (89) dengan Realisasi A (88,91) maka didapatkan Capaian Kinerja 99,898 % .

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	(A) 89	A(88,91)*	99,898 %	

Catatan *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	tanpa satuan	A (87.5)	A (86.96)	99.38	A (88)	A (88.84)	100.95	A (89)	A (88.91)	99,898

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No. Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerj	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	A (88,91)*	A (90)	98.71	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

*Catatan *) Data Capaian Tahun 2024*

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Perkimtan LH Kab. Pessel	Dinas Perkimtan n Prov. Sumbar	Kementerian PR	Kementerian LH	Kementerian Pertanahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	A (88,91)*	BB(71.1)*	BB (76,4)*	BB (78,75)*	B (67)

*Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024*

Sumber : 1. Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat

2. <http://1data.menpan.go.id>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);

- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup selama Tahun 2025 telah memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik).

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1: Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	A (89)	A (88,91)*	99,898	5.561.238.639	5.448.515.314	97,97	2,13

Catatan *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran} / \text{rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran} / \text{rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2,13 %.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah A (89), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar A (88,91) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,898%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A (88,84). Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,42
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,69
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,42
4	Evaluasi Internal	25,00	22,38
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		88,91
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Gambar 3.2 : Gambar Hasil Penilaian Kinerja Perkimtsn LH 2024 oleh Inspektorat

Dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala ;
- b) Agar mendorong setiap unit/satuan kerja dan seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

3) Pelaporan Kinerja

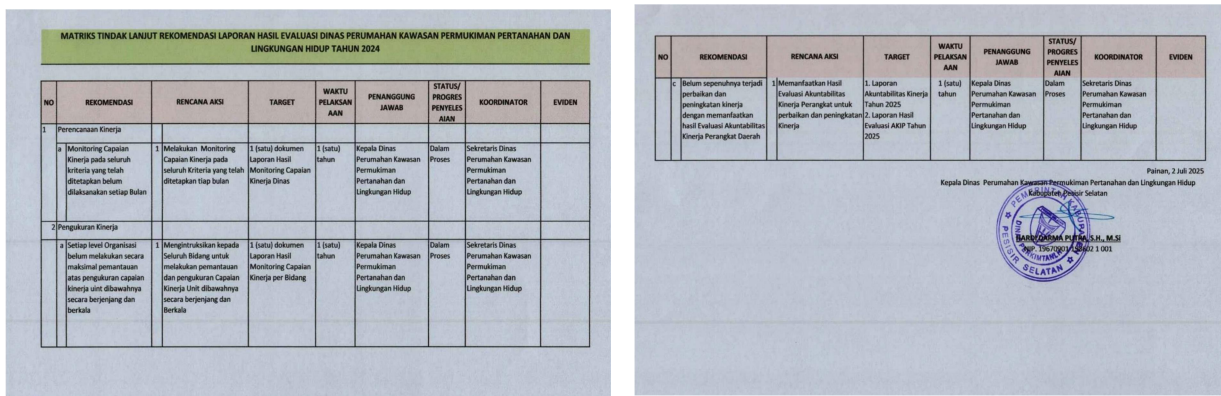
- a) Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai

- b) Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten



Gambar 3.3 : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN; dan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan bahan Logistik kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.448.515.314 atau 97,97 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.561.238.639, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,03 %.

Sasaran Strategis 2 :**Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Nilai Inovasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang di bisa dilihat penilaiannya di Aplikasi IGA dengan Target A (100) dengan Realisasi A (97) maka didapatkan Capaian Kinerja 97 %.

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	100	97	97	

Sumber : Bidang PSLB3P2L Tahun 2025

#	Nama Pemda	Nama Akun	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Nama Inisiator	Koordinat	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Waktu Pengembangan Inovasi Daerah	Estimasi Skor Kematangan
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Berdayakan Bank Sampah Menuju Zero Waste	Penerapan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	-1.3397970898429137, 100.68651138026896	lingkungan hidup	10/01/2023	-	97.00

Gambar 3.4 : Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2024

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mencapai 97,00

dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 97,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu Berdayakan Penerapan Bank Sampah Menuju Zero Waste dengan prediket **Tinggi** yaitu sudah tahap Implementasi.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Dinas dengan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi dengan 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	tanpa satuan	100	97	97 %	100	97	97 %	100	97	97 %

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 mendapatkan Nilai Inovasi yang sama dari Tahun 2023, 2024 dan 2025.

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	97	100	97	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

**Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	100,00	97,00	97,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan hidup dikarenakan karena ada beberapa indikator penilaian IGA yang nilainya belum sempurna seperti kegiatan belum direplika atau digunakan	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara lebih banyak mensosialisasikan pengurangan sampah dengan membuat satu kampung atau nagari percontohan

							ditempat laian	untuk mengolah sampahnya sendiri
--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------------------------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Nilai Inovasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100,00	97,00	97,00	6.732.188.147	6.644.952.686	98,70	1,73

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3. 12 diatas tingkat efesiensi sumber daya sebesar 1,73 %

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi berupa terapan, diharapkan sudah bisa di akses dan dipergunakan untuk publikasi dan sudah direplikasi oleh daerah lain
2. MoU (Perjanjian Kerjasama) untuk penggunaan aplikasi oleh daerah lain
3. Melibatkan Akademisi dalam proses pembuatan aplikasi
4. Evaluasi Komitmen Kinerja Inovasi
5. Manajemen Inovasi
6. Keberlanjutan Inovasi

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota
2. Penanganan sampah melalui pengangkutan
3. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
4. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di Instalasi Pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLSa, RDF, pusat pengomposan Biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
5. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perumahan kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 6.644.952.686 atau 98.70% dari total anggaran sebesar Rp. 6.732.188.147, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,73 %.

Sasaran Strategis 3 :

Terjaminnya Kelestarian Lingkungan

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH didapatkan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

a. Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2025.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 79,64) + (0,405 \times 85,10) + (0,219 \times 85,10) \\ &= 29,944 + 34,465 + 18,636 \end{aligned}$$

$$\text{IKLH} = 83,05 \text{ (baik)}$$

- Keterangan
1. IKU = Indek Kualitas Udara
 2. IKL = Indek Kualitas Lahan
 3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 80 menunjukkan Lingkunganyang baik.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tanpa Satuan	80	83,05	103,812 %
Rata-rata capaian (%)						103,812

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id>

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 80 dengan tingkat capaian sebesar 103,812% predikat **Sangat Baik**.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	tanpa satuan	72.76	77.64	106.71	73.07	79.69	109.06	80	83,05	103.812

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id>

Dari Tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Saat ini upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terjaminnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,05	73,69	103,812	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025 Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	83,05	80,12	75,53

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id>

Berdasarkan tabel.3.16 dapat dilihat capaian IKLH Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dari pada Capaian IKLH Provinsi dan capaian IKLH Nasional, Capaian IKLH Pesisir Selatan 83,05, Capaian Provinsi Sumatera Barat 80,12 dan Capaian IKLH Nasional 75,53. Capaian IKLH Provinsi Sumatera Barat dan capaian IKLH Nasional banyak dipengaruhi dari macam macam kondisi karakteristik dari berbagai wilayah dan respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dampak dari masing masing daerah. Apabila IKLH dari berbagai daerah yang masih dengan kondisi sedang banyak bertambah ke kondisi baik maka IKLH Provinsi Sumatera Barat dan IKLH Nasional akan bertambah baik juga. Pada tahun 2025 IKLH Provinsi Sumatera Barat kondisi Sedang dan IKLH Nasional masih di kondisi Baik. Dari tabel 3.17 dapat dilihat kondisi IKLH Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2025

No	Kab/kota	IKLH		Kategori
		Target	Realisasi	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	79,81	83,05	Sedang
2	Kabupaten Solok Selatan	78,96	82,64	Sedang
3	Kabupaten Solok	78,66	82,32	Sedang
4	Kabupaten Pasaman	80,28	81,61	Sedang
5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	80,1	81,24	Sedang
6	Kota Padang	77,22	80,86	Sedang
7	Provinsi Sumbar	77,95	80,12	Sedang
8	Kabupaten Agam	76,87	78,96	Sedang
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	75,8	78,91	Sedang
10	Kabupaten Tanah Datar	76,15	78,41	Sedang
11	Kota Padang Panjang	74,34	77,7	Sedang
12	Kabupaten Padang Pariaman	76,96	77,55	Sedang
13	Kabupaten Sijunjung	77,23	77,4	Sedang
14	Kota Sawah Lunto	71,91	76,93	Sedang
15	Kota Solok	71,06	73,58	Sedang
16	Kabupaten Dharmasraya	72,82	72,89	Sedang
17	Kota Pariaman	69,97	72,07	Sedang
18	Kota Payakumbuh	68,37	70,67	Sedang
19	Kota Bukittinggi	65,27	68,36	Sedang
20	Kabupaten Pasaman Barat	76,03	49,71	Buruk

Sumber : Aplikasi IKLH KLH/BPLH 2025

Dari tabel 3.17 dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada posisi Pertama di Sumatera Barat dengan nilai IKLH 83,05 dengan rating Sedang. Sedangkan nilai IKLH terendah di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai IKLH 49,71.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini

Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Kualitas Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	80	83,05	103,812 %	Baiknya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : *Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Penyebab keberhasilan untuk peningkatan Indeks Lingkungan Hidup dilakukan berbagai cara pendekatan dari berbagai pihak. Untuk pengujian air Parameter yang di uji adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2025 antara lain : DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.5 : Pengujian Sampel Indeks Kualitas Air

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan) adalah: Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Program Pengelolaan Persampahan di berlakukan di seluruh pelosok kabupaten dengan membersihkan sampah dan mengumpulkan sampah serta mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Program Keanekaragaman Hayati dengan memelihara, merawat dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel.3.19

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Kota	RTH Hutan Kota Bukit Langkisau	166	Salido	IV Jurai	- 1.3440527 77777770	100.571841 6666660
2	Taman Kota	RTH Taman Kota	2.5045	Painan	IV Jurai	- 1.3419722	100.586149 9999990

		Kawasan Stadion H. Ilyas Yacub				22222220	
3	Taman Kota	RTH Taman Spora	1.346	Painan	IV Jurai	- 1.3448444 44444440	100.578822 2222220
4	Taman Kota	RTH Taman Kota Kawasan Shelter Rawang	0.46	Painan	IV Jurai	- 1.3421472 22222220	100.586774 9999990
5	Taman Kota	RTH Taman Kota Kawasan Islamic center	1.26	Salido	IV Jurai	- 1.3057583 33333330	100.541836 1111110
6	Taman Kota	RTH Taman Pantai Carocok	12.023	Painan	IV Jurai	- 1.3522944 44444440	100.564852 7777770
7	Taman Kota	RTH Taman Kawasan GOR Zaini zein	2.3023	Painan	IV Jurai	- 1.3575833 33333330	100.576011 1111110
8	Taman Rekreasi	RTH Taman Rest Area Batas Kota	0.1	Siguntur	Koto XI Tarusan	- 1.0692472 22222220	100.430086 1111110
9	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor Dinas PERKIMTA NLH	0.2046	Painan	IV Jurai	- 1,339,932, 052,692,22 0	10,058,688, 190,318,70 0
10	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor UPTD KPHP PESSEL	0.1445	Painan	IV Jurai	- 13,402,805 ,774,055,1 00	10,058,580, 881,159,00 0
11	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor Bupati PESSEL	0.2715	Painan	IV Jurai	13,477,735 ,144,669,3 00	10,057,784, 081,176,30 0
12	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor BAPEDALI TBANG PESSEL	0.4985	Painan	IV Jurai	- 1,306,661, 875,084,44 0	10,054,555, 087,654,30 0
13	Sempadan Sungai	RTH Sungai Sutera	1160.216	Koto Nan Tigo	Sutera	- 1.5770250 00000000	100.639555 5555550

14	Sempadan Sungai	RTH Sungai Silaut	1606.8363	Silaut 6	Silaut	- 2.4343777 77777770	100.999627 7777770
15	Sempadan Sungai	RTH Sungai Ranah Pesisir	1263.0128	Padang Laban	Ranah Pesisir	- 1.7876194 44444440	100.771844 4444440
16	Sempadan Sungai	RTH Sungai Tapan	717.0095	Talang Balarik	Ranah Ampek Hulu Tapan	- 2.1639972 22222220	101.094072 2222220
17	Sempadan Sungai	RTH Sungai Pancung Soal	1317.6815	Inderapura	Pancung Soal	- 1.9939027 77777770	100.876408 3333330
18	Sempadan Sungai	RTH Sungai Lunang	1222.7733	Lunang	Lunang	- 2.2703333 33333330	100.879475 0000000
19	Sempadan Sungai	RTH Sungai Linggo Sari Baganti	991.9776	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.9211527 77777770	100.885680 5555550
20	Sempadan Sungai	RTH Sungai Lengayang	1306.9512	Kambang	Lengayang	- 1.6852833 33333330	100.701272 2222220
21	Sempadan Sungai	RTH Sungai Tarusan	1320.414	Batu Hampar	Koto XI Tarusan	- 1.2722750 00000000	100.466661 1111110
22	Sempadan Sungai	RTH Sungai Bayang	417.213	Pasar Baru	Bayang	- 1.3029055 55555550	100.503152 7777770
23	Sempadan Sungai	RTH Sungai IV Jurai	993.156	Tambang	IV Jurai	- 1.3373499 99999990	100.571663 8888880
24	Sempadan Sungai	RTH Sungai Bayang Utara	758.2241	Limau Gadang	Bayang Utara	- 1.2278944 44444440	100.538530 5555550
25	Sempadan Sungai	RTH Sungai Batang Kapas	1376.965	IV Koto Hilie	Batang Kapas	- 1.4804805 55555550	100.598163 8888880
26	Sempadan Sungai	RTH Sungai BAB Tapan	1169.8724	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	- 2.1495111 11111110	101.079197 2222220
27	Sempadan Sungai	RTH Sungai Air Pura	707.4995	Inderapura Utara	Airpura	- 1.9879777 77777770	100.874702 7777770
28	Sabuk Hijau	RTH Pantai Tarusan	1256.895	Nanggalo	Koto XI Tarusan	- 115460805 27554700	100384957 51176200

29	Sabuk Hijau	RTH Pantai Bayang	61.5419	Pasar Baru	Bayang	- 1.3027777 77777770	100.498294 4444440
30	Sabuk Hijau	RTH Pantai IV Jurai	689.81	Painan	IV Jurai	- 1.3127888 88888880	100.547544 4444440
31	Sempadan Pantai	RTH Pantai Sago	2.45	Sago	IV Jurai	- 1.3095722 22222220	100.541233 3333330
32	Sabuk Hijau	RTH Pantai Batang Kapas	599.605	Taluk	Batang Kapas	- 1.3837916 66666660	100.587522 2222220
33	Sabuk Hijau	RTH Pantai Sutera	988.4468	Surantih	Sutera	- 1.5345305 55555550	100.623200 0000000
34	Sabuk Hijau	RTH Pantai Lengayang	1547.3023	Kambang	Lengayang	- 1.6800722 22222220	100.697994 4444440
35	Sabuk Hijau	RTH Pantai Ranah Pesisir	1752.4659	Palangai	Ranah Pesisir	- 1.7714583 33333330	100.759491 6666660
36	Sabuk Hijau	RTH Pantai Linggo Sari Baganti	1882.4014	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.8665138 88888880	100.830338 8888880
37	Sabuk Hijau	RTH Pantai Air Pura	894.1393	Lalang Panjang Inderapura	Airpura	- 1.9902277 77777770	100.870700 0000000
38	Sabuk Hijau	RTH Pantai Lunang	997.9846	Lunang	Lunang	- 2.2771361 11111110	100.878844 4444440
39	Sabuk Hijau	RTH Pantai Silaut	1512.1425	Sambungo	Silaut	- 2.4401722 22222220	100.998950 0000000
40	Media Jalan	RTH Jalan Tarusan	1546.9466	Duku	Koto XI Tarusan	- 1.0694277 77777770	100.430258 3333330
41	Media Jalan	RTH Jalan Bayang	675.7622	Pasar Baru	Bayang	- 1.2984388 88888880	100.494383 3333330
42	Media Jalan	RTH Jalan IV Jurai	1096.744	Salido	IV Jurai	- 1.3090944 44444440	100.548583 3333330
43	Media Jalan	RTH Jalan Batang Kapas	2790.1059	IV Koto Hilie	Batang Kapas	- 1.3988861 11111110	100.590711 1111110
44	Media Jalan	RTH Jalan SUTERA	2788.0544	Surantih	Sutera	- 1.5639333 33333330	100.640713 8888880

45	Media Jalan	RTH Jalan Lengayang	3068.4913	Kambang	Lengayang	- 1.6798111 11111110	100.698397 2222220
46	Media Jalan	RTH Jalan Ranah Pesisir	1985.1964	Sungai Tunu	Ranah Pesisir	- 1.7789472 22222220	100.782002 7777770
47	Media Jalan	RTH Jalan LS Baganti	2071.9677	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.8191222 22222220	100.848324 9999990
48	Media Jalan	RTH Jalan Air Pura	2338.7616	Lalang Panjang Inderapura	Airpura	- 1.9631027 77777770	100.920302 7777770
49	Media Jalan	RTH Jalan Pancung Soal	2892.3745	Inderapura	Pancung Soal	2.0079388 88888880	100.953550 0000000
50	Media Jalan	RTH Jalan BAB Tapan	1983.7618	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	2.1063333 33333330	101.053297 2222220
51	Media Jalan	RTH Jalan RAHUL Tapan	1211.1575	Kampung Tengah Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.1480833 33333330	101.088872 2222220
52	Media Jalan	RTH Jalan Lunang	2687.6766	Lunang	Lunang	2.2139666 66666660	101.118891 6666660
53	Media Jalan	RTH Jalan Silaut	2823.0991	Silaut	Silaut	- 2.3326222 22222220	101.155275 0000000
54	Media Jalan	RTH Jalan Bayang Utara	1357.8393	Puluik-puluik	Bayang Utara	- 1.2300194 44444440	100.547291 6666660
		Jumlah	60020.0407				

- (1) Jenis RTH : Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, Sempadan Jalan, Sempadan Sungai, dll
- (2) Nama RTH : Sesuai dengan SK atau penamaan lain
- (3) Luas : Luas (Hektar)
- (4) Desa : Nama Desa
- (5) Kecamatan : Nama Kecamatan
- (6) Koodinat Lintang : Koordinat proyeksi geografis (WGS84) dalam satuan derajat desimal (untuk LS diawali dengan notasi (-))
- (7) Koodinat Bujur : Koordinat proyeksi geografis (WGS84) dalam satuan derajat desimal

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil

Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS dan melakukan pengendalian terhadap bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) melalui Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dilihat dari Dokumen Lingkungan dan SPPL yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen UKL-UPL sebanyak 5 (Lima) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Kecamatan Ranah Pesisir, Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Lunang, Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Pancung soal, Perkebunan Kelapa Sawit kecamatan Pancung soal, Pabrik Kelapa Sawit kecamatan Lunang
2. Dokumen DELH sebanyak 2 (dua) dokumen terdiri Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit kecamatan Silaut dan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Lunang dan Kecamatan Pancung Soal

Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dilakukan penilaian status ketaatan Pemrakarsa/perusahaan/kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.20

**Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2025**

No	Objek Usaha dan/atau Kegiatan	Sektor Kegiatan	Lokasi	Dokumen	Keterangan
1	PT Dempo Sumber Energi	Pembangkit Listrik	Kecamatan Ranah Pesisir	UKL-UPL	Taat
2	PT Sumatera Jaya Agrolestari	Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Silaut	DELH	Taat
3	PT Sukses Jaya Wood	Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Lunang	UKL-UPL	Taat
4	PT Transco Energi Utama	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Pancung Soal	UKL	Taat
5	PT Sumbar Andalas Kencana	Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Pancung Soal	UKL	Taat
6	PT Muara Sawit Lestari	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Lunang	UKL	Taat
7	PT Incasi Raya	Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Lunang dan Kecamatan Pancung Soal	DELH	Taat

Sumber : Bidang Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.21

**Penanganan Pengaduan Lingkungan dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat
terhadap PPLH kabupaten/Kota Tahun 2025**

No	Objek Pengaduan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Muatan Pengaduan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	PT. Tigo Padusi Nusantara	Pertambangan	Kec. IV Jurai	Perusakan lingkungan	Diterbitkan surat penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan penambangan oleh PT Tigo Padusi Nusantara	
2.	PT. Bayang Nyalo Hidro	Energi/ Pembangkit Listrik	Kec. IV Nagari Bayang Utara	Perusakan sungai	Telah dilaksanakan tinjauan awal dan Penelaahan terhadap muatan pengaduan	
3.	PT. Tigo Padusi Nusantara	Pertambangan	Kec. IV Jurai	Batas administrasi	Dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	

4.	SPPG Kampung Luar Salido	Pengolahan Makanan	Kec. IV Jurai	Pencemaran lingkungan	Penelaahan terhadap muatan pengaduan dan kewenangan	
----	--------------------------------	-----------------------	------------------	--------------------------	--	--

Sumber : Bidang Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



Gambar 3.6 : Rapat Pengaduan dan Tinjauan Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung sasaran 2 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Tabel 3.22
Realisasi Kegiatan yang menunjang Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		Target	Realisasi				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Formula : (0.376 x IKA) + 0.405 x IKU) + 0.219xIKL)	80	83,05	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	430.095.514	421.176.736	97,93
				Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	1.953.380.999	1.918.873.468	98,23
				Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)	13.107.530	11.961.863	91,26
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	86.618.443	86.545.030	99,92
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	46.996.170	46.847.740	99,68
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.771.480	22.765.729	99,97
				Program Pengelolaan Persampahan	6.732.188.147	6.644.952.686	98,70
				JUMLAH			

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa capaian kinerja sudah tercapai melebihi target dengan capaian 103,812 %. Dari sisi capaian Anggaran dari alokasi anggaran Rp. 9.285.158.283, terealisasi Rp. 9.153.123.252 dengan tingkat capaian 98,57 %.

Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mendapatkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025.



Gambar 3.7. Foto Penerimaan Penghargaan Piala Adiwiyata

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.23
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Terjaminnya Kualitas
Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80	83,05	103,812	9.285.158.283	9.153.123.252	98,57	5,04%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.23 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 5,04 %.

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran} / \text{rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran} / \text{rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= 1 - \{ 11.887.495.693 / 12.221.548.662 \} \times 100 \% \\ &= (1 - 0,9495) \times 100 \% = 0,00504 \times 100\% \\ &= 5,04\% \end{aligned}$$

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Keluarga Bahagia

Untuk mendukung sasaran strategis 4 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mendukung Misi 6 dengan sasaran strategis terwujudnya keluarga bahagia yang indikator kinerjanya adalah Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Untuk menghitung Realiasi Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni diformulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} &= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100 \% \\ &= (107.468 / 115.542) \times 100 \% \\ &= 93.0121 \% \end{aligned}$$

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini.

Tabel 3.24
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Unggulan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,2033	93,0121	99,794 %
Rata-rata capaian (%)						99,794

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2025 berdasarkan hasil penanganan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang dikerjakan Tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 99,794% predikat **Sangat Baik**

b. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini :

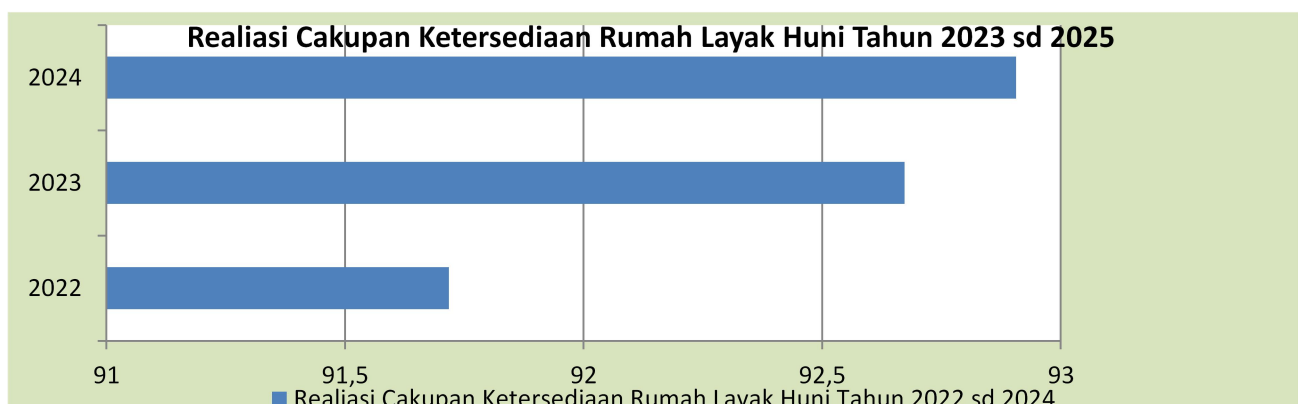
Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir indikator kinerja Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	91.7109	92.673	101.049 %	93.2033	92.9065	99.682 %	93.2033	93.0121	99.794 %

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025,

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni karena mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari dana APBN dengan jumlah bantuan Rehab Rumah per tahun lebih kurang 1000 Unit. Rumah. Pada Tahun 2025 hanya mendapatkan bantuan Rehab Rumah dari dana APBN sebanyak 11 Unit, APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 Unit dan dari Bantuan Badan Amil Zakat sebanyak 76 Unit dengan jumlah penanganan total tahun 2025 sebanyak 117 Unit. Perbandingan capaian dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 s.d Tahun 2025



Sumber : *Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Analisis hasil capaian kinerja untuk 3 tahun terakhir indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni mengalami kenaikan yaitu adanya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni. **Sisa Rumah Tidak Layak Huni yang harus dituntaskan pada tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah 8.074, dari total awal periode RPJMD Tahun 2021 adalah 11.345 Unit. Jadi penanganan RTLH yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir adalah 3.271 Unit.**

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.26 dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,0121 %	94.4274	98.501	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini

Tabel 3.27
Perbandingan Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir
Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Laak Huni	Persen	93,2033	- (Tidak Ada Kewenangan)	58.99*)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.27 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tinggi dibandingkan dengan Capaian Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat Pekerjaan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak ada kewenangan karena penanganan Rehabilitasi hanya kewenangan Kabupaten/ Kota dan Pusat.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.28
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,2033	93,0121	99,794	Peningkatan Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tergantung dari Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan per tahun. Semakin banyak penanganan, maka semakin tinggi capaian.	Melakukan Upaya untuk mendapatkan dana Non APBD, seperti anggaran BSPS dari Kementerian PUPR, dana CSR dan dana Bantuan Amil Zakat (BAZ)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 s.d Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.29
Capaian Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	LOKASI	PENANGANAN RTLH				JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2025	JUMLAH RLH 2025	KET
		APBD	APBN	BAZ	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO XI TARUSAN	7		8	15	14,705	633	14,072	
2	BAYANG	3		4	7	9.678	532	9.140	
3	BAYANG UTARA			1	1	1.520	174	1346	
4	IV JURAI			16	16	7,270	176	7,094	
5	BATANG KAPAS			7	7	11,789	297	11,492	
6	SUTERA		11	5	5	13,450	581	12,869	
7	LENGAYANG			3	3	16,289	885	15,404	
8	RANAH PESISIR	1		3	4	10,319	709	9.613	
9	LINGGO SARI BAGANTI			8	8	7,871	370	7.501	
10	AIR PURA			3	3	3,259	767	2492	

11	PANCUNG SOAL	11		5	16	5,248	729	4519	
12	BASA IV BALAI TAPAN	2		6	8	2,491	496	1995	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2		0	2	3,192	342	2850	
14	LUNANG	4		3	7	5,069	901	4168	
15	SILAUT			4	4	3,392	558	2,834	
	JUMLAH	30	11	76	117	115.542	8.074	107.468	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari Dana APBN kita mendapatkan alokasi penanganan RTLH sebanyak 11 Unit, menggunakan dana Badan Amil Zakat (BAZ) dengan total penanganan sebanyak 76 Unit. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2025 penanganan RTLH sebanyak 30 unit.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.30
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Laak Huni	93,20 33	93,0121	99,794	870.600.710	867.487.808	99,64	0.14

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.29 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.14 %.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Kawasan Permukiman, terdiri dari terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyusunan/Review/Legalisasi kebijakan bidang PKP
 2. Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 (satu) kegiatan
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian:
 2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana dan utilitas umum perumahan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah sebesar Rp. 867.487.808 atau 99.64 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 870.600.710 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,14 %. Masing Program Raeliasai Keuangannya dapat dilihat pada tabel Tabel 3.20 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Gambar 3.8 : *Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Sebelum dilakukan Rehabilitasi)*



Gambar 3.9 : *Kondisi Rumah Layak Huni (Setelah dilakukan Rehabilitasi)*

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Tabel 3.21 berikut

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Perangkat Daerah	A(89)	A (88,91)	99,898	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.526.666.619	5.413.957.259	97,96
						Proram Redistribusi Tanah, Serta Ganti kerugian Program Tanah kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	16.251.895	16.247.610	99,97
						Program Penetapan Tanah Ulayat	18.320.125	18.310.445	99,95
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	100	97	97	Program Pengelolaan Persampahan	6.732.188.147	6.644952.686	98,70
3	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80	83,05	103,812	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	430.095.514	421.176.736	97,93
						program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.953.380.999	1.918.873.468	98,23
						Program Pengendalian Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.107.530	11.961.863	91,26

						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	86.618.443	86.545.030	99,92
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	46.996.170	46.847.740	99,68
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.771.480	22.765.729	99,97
4	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93.2033%	93.0121%	99,794	Program Kawasan Permukiman	134.961.170	132.766.268	98,37
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	700.000.000	699.849.962	99,98
						Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35.639.540	34.871.578	97,85
Total							15.716.997.632	15.469.126.374	98,42

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, yang nilai tertinggi 103,812% yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan”. Sedangkan nilai terendah 97 % yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah”.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (Empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, Tiga indikator kinerja berhasil mencapai target. Satu Indikator yang tidak mencapai target yaitu Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah **100,126 %** dengan nilai tertinggi 103,812 % yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan”. Sedangkan nilai terendah 97 % yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah”.

c. Capaian Indikator Keuangan

Untuk mencapai target masing - masing Sasaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan :

1. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 5.561.238.639,- terealisasi Rp 5.448.515.314 (97,973%),
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Media Lingkungan anggaran yang dibutuhkan Rp. 2.552.970.136,- terealisasi Rp. 2.430.280.039 (95,19%),
3. Sasaran Terwujudnya Keluarga Bahagia anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 870.600.710,- terealisasi Rp 867.487.808 (99,64%),
4. Sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah yang dibutuhkan Rp. 6.732.188.147,- terealisasi Rp. 6.644.952.686 (98,70 %),

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Mengharapkan dukungan dari berbagai pihak (terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah) agar mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh di Pesisir Selatan agar Kabupaten Pesisir Selatan bebas dari kawasan kumuh;
3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
5. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup



Roli Buchari, S.T., M.T
NIP. 197504172005011013